

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Afifuddin, 2012, *Kapita Selekta Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi dan Lia Yuliana, 2013, *Manajemen Pendidikan*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Astawa, I Gde Pantja, 2013, *Problematika Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajarm Yogyakarta.
- Fauzan, Muhammad, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Uii Press, Yogyakarta.
- Mahfud MD, 2014, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Manan Bagir, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum, UII, Yogyakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2011, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Muchsan, 1981, *Peradilan Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Sibaweh, Imam dan Diding Nurdin, 2015, *Pengelolaan Pendidikan Dari Teori Menuju Implementasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudi, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW., 2014, “Metodologi Penelitian Ilmu Hukum”, *Bahan Kuliah*,  
Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Suryonosubroto B, 2010, *Beberapa Aspek Dasar-dasar Kependidikan*, Rineka Cipta,  
Jakarta.

Terry R Gerorge, 2016, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.

Wahidin, Samsul, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pendulum Otonomi Daerah  
dari Masa ke Masa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Widjaja, Haw, 1992, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat 11 Cetakan Pertama*,  
PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

## **B. Tesis**

Amnesti, Sheila Kusuma Wardani, “Implementasi Kebijakan Pendidikan Oleh  
Pemerintah Kota Surakarta (Studi Kasus: Bantuan Pendidikan Masyarakat  
Kota Surakarta)”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas  
Gadjah Mada Yogyakarta, 2014.

John Harry Isabela Patty, “Fungsi Pemerintah Daerah di Kabupaten Sleman dan Kota  
Yogyakarta Dalam Memberikan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan”,  
*Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
Yogyakarta, 2012.

Mudagdo, 2012, “Fungsi Pendidikan Propinsi DIY Setelah Berlakunya Undang-  
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Konteks Pelayanan Masyarakat”,  
*Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
Yogyakarta, 2012.

Wibowo, Arif, “Fungsi Kepala Daerah Kabupaten Sanggau Dalam Melakukan Pengawasan di Bidang Pendidikan di Kabupaten Sanggau (Sekolah Menengah Atas), *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016.

### C. Jurnal

Andriani, Dwi Esti, “Program Peningkatan Mutu Guru Berbasis Kebutuhan”, *MP Manajemen Pendidikan*, Volume 23, Nomor 5, Maret, 2012.

Rahmatunnisa, Mudiwati, “Jalan Terjal Kebijakan Desentralisasi di Indonesia Pada Era Reformasi”, *Padjadjaran*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2015.

Wicaksono, Dian Agung, “Transformasi Pengaturan Distribusi Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintahan Daerah”, *Padjadjaran*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2015.

### D. Internet

Rusman, “Diduga Ada Pungli Pengurusan Sertifikasi Guru”, <http://zonasultra.com/diduga-ada-pungli-pengurusan-sertifikasi-guru-di-kolut.html>, Akses 16 September 2017.

Www. bps.go.id, “jumlah sekolah guru dan murid sekolah menengah atas (SMA) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurut Provinsi tahun ajaran 2011/2012-2014/2015”, *Www.bps.go.id*, Akses 26 September 2017.

### E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4586)

Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78).

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91)

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2017 Nomor 66)